**PEMELIHARAAN ASET PEMERINTA H KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DI
LOKASI OBJEK WISATA AIR TERJUN GURUH GEMURAI TAHUN 2019**

**Oleh : Dadang Mario Syamsi
Dosen Pembimbing: Wazni S.Ip, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
TELP/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Regional assets are all regional assets in the form of tangible and intangible goods. Regional assets are one of the important elements in the implementation of government and services to the community. Regional assets are important resources for local governments because regional assets or goods are the economic potentials owned by the regions. Kuantan Singingi Regency in the tourism sector has great potential to be explored. The wealth of tourism potential that is owned by Kuantan Singingi Regency, of course, requires good and appropriate management. To manage this potential, the main role is in the hands of local governments. However, the local government has not shown its seriousness in managing Kuantan Singingi tourism, this can be seen from the absence of regulations governing tourism development.

This study aims to describe the maintenance of government assets of Kuantan Singingi Regency which is located in the location of the Guruh Gemurai Waterfall Tourism Object. In addition, to find out the factors that become obstacles to this implementation. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques based on observation, literature study and interviews.

The results of this study indicate that the maintenance of local government assets at the location of the Guruh Gemurai waterfall tourist attraction in 2019 consists of recording the plan for the needs of regional assets consisting of supervision and maintenance which is constrained by a limited budget. Inhibiting factors consist of internal factors and external factors. As for the internal factors that become obstacles, namely, limited funds, the absence of a Regional Regulation concerning the Master Plan for Regional Tourism Development, and inadequate Human Resources. Meanwhile, the external factor that becomes an obstacle is the low participation of the private sector in developing tourism destinations.

Keywords: Regional Assets, Regional Asset Maintenance

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak (real property) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan

air, jalan dan jembatan, instansi, jaringan, dan serta monument/bangunan bersejarah (heritage)

2. Benda bergerak (personal property) meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

Dalam menjaga aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka diperlukan sebuah peraturan dalam hal ini seperti Peraturan Daerah mengenai pengelolaan aset daerah di daerah tersebut.

Unit Pengelolaan Aset Daerah sangat berperan dalam pengadaan serta pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan system kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, system pengelolaan aset daerah senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berprinsip pada transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Kabupaten Kuantan Singingi dalam bidang pariwisata mempunyai potensi yang besar untuk digali. Kekayaan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kuantan Singingi tentu saja memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat. Untuk mengelola potensi tersebut, peran utama berada pada tangan pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusannya dalam mengelola pariwisata Kuantan Singingi, hal ini bisa dilihat dari belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembangunan kepariwisataan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada pasal 8 ayat (1) yaitu “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”.

Sebagaimana menimbang bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan unggulan daerah serta dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan diperlukan langkah terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah maka dikeluarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts 25/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Pariwisata dan Nama Objek Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagaimana latar belakang ataupun pokok-pokok pikiran dalam pembuatan keputusan Bupati tersebut, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kuantan Singingi ingin mewujudkan suatu destinasi menjadi destinasi pariwisata unggulan melalui dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun OPD yang bertanggung jawab dalam hal tersebut belum mampu untuk mewujudkan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata unggulan. Dimana, objek wisata yang ada saat ini masih belum terkelola dengan baik dan masih belum terpenuhinya dengan baik untuk unsur atraksi (attraction), Fasilitas (amenities) dan aksesibilitas (accessibility). Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki banyak objek wisata yang bisa dikembangkan salah satunya objek wisata air terjun yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Objek Wisata Air Terjun di
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban	Hulu Kuantan
2	Terjun Guruh Gemurai	Kuantan Mudik
3	Terjun Pati Soni	Kuantan Mudik

Sumber Data : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2018.

Dari tabel di atas salah satunya adalah Objek Wisata Air

Terjun Guruh Gemurai terletak di Kecamatan Kuantan Mudik (Lubuk Jambi) tepatnya di Desa Kasang, lokasi wisata tersebut bisa di capai dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum, jaraknya dan Taluk Kuantan ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi sekitar 25 kilometer kearah terminal Kiliran Jao (perbatasan Sumatra Barat-Riau). Daya tarik dan objek wisata ini adalah terdapatnya air terjun yang bertingkat-tingkat, sehingga sangat menarik untuk dikunjungi. Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan dilihat dari perannya sebagai wirausaha yaitu dengan melakukan pengelolaan objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang nantinya akan berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejauh ini, objek wisata yang ada di kabupaten Kuantan Singingi belum berkontribusi dalam jumlah yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana hanya satu objek wisata yang berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yaitu Air Terjun Guruh Gemurai. Berikut Jumlah Pengunjung Air Terjun Guruh Gemurai dan penerimaan PAD dari retribusi masuk objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai.

Tabel 1.2
Jumlah Pengunjung dan PAD Air Terjun Guruh Gemurai Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)	PAD
1	2017	15.800 Orang	78.200.000

2	2018	10.300 Orang	53.200.000
3	2019	16.794 Orang	81.892.000

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 objek wisata air terjun guruh gemurai memiliki jumlah pengunjung sebanyak 10.300 orang dengan jumlah PAD sebesar Rp.53.200.000. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah pengunjung yaitu sebanyak 16.794 orang dengan jumlah PAD sebesar Rp.81.892.000. PAD tersebut berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Adapun ketentuan besarnya tarif retribusi masuk tempat rekreasi Guruh Gemurai diatur dalam pasal Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga. Besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas ditempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ditetapkan berdasarkan tempat lokasi dan fasilitas yang tersedia diatur sebagai berikut:

1. Retribusi Masuk Tempat Rekreasi Guruh Gemurai

a. Hari Biasa:

1) Karcis masuk anak-anak Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) perorang;

2) Karcis masuk dewasa Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah) per orang;

3) Karcis masuk kendaraan roda

2(dua) Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah)
per Orang

4) Karcis masuk kendaraan roda
4(empat) Rp.5000,-(Lima ribu
rupiah) per Orang

5) Karcis masuk kendaraan roda
6(enam) Rp.6000,-(enam ribu
rupiah) per Orang

b. Hari Minggu/Hari Besar:

1) Karcis masuk anak-anak
Rp,2000,-(dua ribu rupiah) per
orang

2) Karcis masuk dewasa Rp.4000,-
(empat ribu rupiah) per orang

3) Karcis masuk kendaraan roda
4(empat) Rp.5000,-(Lima ribu
rupiah) per Orang

4) Karcis masuk kendaraan roda
4(empat) Rp.5000,-(Lima ribu
rupiah) per Orang

5) Karcis masuk kendaraan roda
6(enam) Rp.6000,-(enam ribu
rupiah) per Orang

c. Sepekan Lebaran:

1) Karcis masuk anak-anak
Rp,2000,-(dua ribu rupiah) per
orang

2) Karcis masuk dewasa Rp.4000,-
(empat ribu rupiah) per orang

3) Karcis masuk kendaraan roda
4(empat) Rp.5000,-(Lima ribu
rupiah) per Orang

4) Karcis masuk kendaraan roda
4(empat) Rp.5000,-(Lima ribu
rupiah) per Orang

5) Karcis masuk kendaraan roda
6(enam) Rp.6000,-(enam ribu
rupiah) per Orang

d. Tarif Rombongan

1) Rombongan

a. Umum Potongan 10% (Sepuluh
persen); dan

b. anak sekolah potongan 20%
(Dua puluh persen).

2) Rombongan dengan kegiatan lain
(kemah,camping, dan lain-lain)

a. potongan 10% (sepuluh persen);

b. pemakaian listrik Rp.50.000,-

(lima puluh ribu rupiah) per
kegiatan/hari; dan

c. Kebersihan Rp.20.000,- (Dua
puluh ribu rupiah)

Sebagai salah satu objek wisata alam yang pertama di Kabupaten Kuantan Singingi kondisi Air Terjun Guruh Gemurai saat ini kurang terawat dan kurang pengelolaannya terutama terhadap sarana & prasarana objek wisata tersebut, Sehingga banyak pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut tidak dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Karena terlihat di objek wisata tersebut fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pengelola kondisinya sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Sebagaimana pemuda desa setempat Hakan Sukur menjelaskan, bahwa air terjun Guruh Gemurai tidak dirawat dengan baik serta kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kondisi air terjun guruh gemurai ini, sebagaimana bisa kita lihat banyaknya fasilitas yang rusak seperti pegangan tangga yang sudah roboh, anak tangga yang ambruk, kamar ganti dan toilet yang tak terawat, serta lahan parkir.¹ Contohnya saja adalah toilet, toilet yang ada kondisinya sudah rusak, pintu sudah copot dan tidak bisa digunakan lagi, begitu juga dengan kamar ganti, kondisinya sudah rusak sehingga pengunjung yang datang susah untuk mencari tempat ganti baju setelah mandi di Air Terjun Guruh Gemurai. Melihat keadaan kolam untuk berendam yang peneliti lihat, tidak layak lagi dijadikan

¹<http://www.suaraindependen.com/2017/08/air-terjun-guruh-gemurai-desa-kasang.html>

sebagai tempat berenang karena sudah banyak sekali lumut-lumut yang terdapat di dinding-dinding kolam berenang tersebut dan membuat batu batu di sekitar air terjun tersebut jadi licin. Dan juga saya melihat tempat beribadahnya/musholla kurang dijaga kebersihannya terutama lantainya yang kotor dan tidak ada yang perlengkapan untuk sholat seperti, sejadah, mukenah, dan lain-lainya.

Alasan peneliti memilih Air Terjun Guruh Gemurai sebagai lokasi penelitian adalah karena sampai saat ini objek wisata alam di Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah menghasilkan PAD hanya air terjun Guruh Gemurai. Namun secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai menjadi salah satu penyebab perlunya penataan manajemen pengelolaan dalam menata pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala di atas tersebut yang penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pemeliharaan Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai tahun 2019”

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemeliharaan Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Yang Berada di Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai.
2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pemeliharaan Aset Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi Yang Berada di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: Untuk mendeskripsikan pemeliharaan aset pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pemeliharaan Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang ilmu pemerintahan. Manfaat Praktis
- b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya mewujudkan Pengelolaan Aset yang baik dan mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi menjadi destinasi wisata unggulan di masa yang akan datang. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat

menjadi acuan penelitian-penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang..

KERANGKA TEORI

Aset

a. Pengertian Aset

Aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Yusuf (2015:164) harta kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang di miliki atau di kuasai oleh Negara atau daerah. Pengertian dimiliki atau dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum negara atau daerah. Pada tingkat pemerintah pusat dikuasai oleh departemen atau lembaga, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah oleh dinas atau badan atau kantor.

Mahmud (2010:146) menyatakan bahwa aset daerah dapat di kategorikan menjadi dua yaitu:

1. Barang tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument atau bangunan bersejarah.
2. Barang bergerak, antara lain mesin, kendaraan, peralatan

(meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor, dan rumah tangga, alat astudio, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan), buku atau perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan atau ternak dan tanaman dan sebagainya.data yang dapat ditangkap indera.

b. Pemeliharaan Aset Daerah

Pemeliharaan aset adalah kondisi mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud aset serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.

Aset merupakan *thing* (barang) atau *anything* (sesuatu barang) yang memiliki *economic value* (nilai ekonomi) atau *exchange value* (nilai tukar) yang dipunyai oleh suatu badan usaha, instansi atau perorangan (individu).² Kata barang sering menjadi sebutan lain guna memberi status yang lebih jelas, yaitu *realestate* dan *real property*. Antar kedua istilah tersebut memiliki makna yang tidak sama meskipun terkadang dianggap bersinonom dalam keadaan tertentu. *Real estate* bersifat *immobile* atau tidak bergerak dan *tangible* atau berwujud. Contohnya adalah aset golongan tanah, pepohonan, bangunan yang dibangun oleh manusia, termasuk

²Siregar, Doli. 2004. *Menagement aset strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia pustaka utama. Hlm: 178

juga barang mineral.³ Sedangkan *real property* dapat diartikan sebagai suatu hak atas aset baik bangunan tanah dan sebagainya secara yuridis. Mencakup seluruh hak kepentingan dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan *real estate*, dan harus dibuktikan dengan harus memiliki sertifikat atau surat bukti kepemilikan atas aset tersebut.

Aset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akuntansi pemerintah), ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. Adapun sumber daya yang tergolong aset dari yang dapat diukur dengan satuan uang dan juga termasuk yang non keuangan yang dirawat karna nilai sejarahnya maupun yang untuk kebutuhan pelayanan jasa umum untuk publik.⁴

Menurut M. Yusuf Pengelolaan aset daerah meliputi beberapa hal yakni sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah

Perencanaan dalam pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran barang daerah. Perencanaan aset daerah dimulai saat penyusunan atau perencanaan barang kebutuhan daerah, system

perencanaan aset daerah. Dalam pembelian aset daerah ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya yaitu perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah. Tahapan dimulai dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) yang dianggarkan dalam RKA oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya terdapat tahapan pengadaan barang daerah yang dilakukan dengan sistem tender.

Dengan kata lain, dalam sistem perencanaan untuk pembelian aset/barang milik daerah, ada dua macam perencanaan yang dilakukan setiap tahun. Yaitu: perencanaan akan pengadaan kebutuhan aset/barang milik pemerintah daerah, dan perencanaan pemeliharaan aset/barang milik pemerintah daerah.

b. Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD

Pelaksanaan mencatat dan menghitung aset daerah mencakup siklus penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Siklus pertama adalah penggunaan, pada pemerintah daerah penggunaan barang milik daerah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Mencatat dan Menghitung aset/barang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan terhadap aset daerah oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD dilakukan juga pemanfaatan aset daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,

³Siregar, Doli. 2016. *Otonomi dan Pengeolaan Aset Daerah*. Jakarta: Sima(Sinergi Manajemen Aset.) Hlm: 36-37

⁴Muhammad Yusuf. 2013. *Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik*. Jakarta: Salemba Empat

bangun guna serah dan bangun serah guna. Pengamanan aset daerah harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga registrasi barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah. Penilaian aset daerah yang merupakan kegiatan menilai atas suatu barang milik daerah yang bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah dan pemindahtanganan.

c. Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Konsekuensi dari pembelian aset/barang adalah timbulnya biaya pemeliharaan agar aset/barang milik daerah dapat bertahan lama dan selalu terpelihara dengan baik. Setiap aset/barang milik daerah memiliki cara pemeliharaan yang berbeda-beda. Aset dalam bentuk tanah cara pemeliharaannya berbeda dengan aset dalam bentuk bangunan; cara pemeliharaan bangunan berbeda dengan cara pemeliharaan aset dalam bentuk peralatan dan mesin. Untuk memfasilitasi kondisi tersebut, pejabat yang mengelola aset perlu melakukan pencatatan dengan baik dan terstruktur terhadap aset/barang yang sedang dipelihara pada tahun yang berjalan. Dengan adanya pencatatan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah setiap tahun dengan baik, diharapkan hasil pemeliharaannya juga menjadi baik karena pengendaliannya akan lebih mudah dilakukan.

Tahapan pengawasan dan Pemeliharaan aset daerah sangat penting untuk menghindari penyimpangan serta menjaga agar

aset daerah tersebut tidak hilang dan tetap terjaga kondisinya secara baik.

b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemeliharaan aset

1. Faktor Internal

Yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

- a) Keterbatasan Dana
- b) SDM yang belum memadai
- c) Regulasi

2. Faktor Eksternal.

- a) Rendahnya Keterlibatan Pihak Swasta Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata.

c. Jenis-Jenis Pemeliharaan

Secara umum, ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dikategorikan dalam dua cara yaitu:

Pemeliharaan Terencana (Planned Maintenance)

a.) Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terorganisir untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Corder, Antony, K. Hadi (1992) Pemeliharaan terencana dibagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu :

a.) Pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance)

Pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance) adalah inspeksi periodic untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan produksi terhenti atau berkurangnya fungsi peralatan dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk menghilangkan, mengendalikan, kondisi tersebut dan mengendalikan

mesin ke kondisi semula atau dengan kata lain deteksi dan penanganan dari kondisi abnormal mesin sebelum kondisi tersebut menyebabkan cacat atau kerugian.

Menurut Jay Heizer dan Barry Render, (2001) dalam bukunya "Operations Management" preventive maintenance adalah : "A plan that involves routine inspections, servicing, and keeping facilities in good repair to prevent failure". Artinya preventive maintenance adalah sebuah perencanaan yang memerlukan inspeksi rutin, pemeliharaan dan menjaga agar fasilitas dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi kerusakan di masa yang akan datang. Ruang lingkup pekerjaan preventive termasuk : inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari kerusakan.

b) Pemeliharaan korektif (Corrective Maintenance)

Pemeliharaan secara korektif (corrective maintenance) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian (termasuk penyetelan dan reparasi) yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. (Corder, Antony, K. Hadi, 1992). Pemeliharaan ini meliputi reparasi minor, terutama untuk rencana jangka pendek, yang mungkin timbul diantara pemeriksaan, juga overhaul terencana.

Menurut Jay Heizer dan Barry Reder, 2001 pemeliharaan korektif (Corrective Maintenance) adalah : "Remedial maintenance that occurs when equipment fails and must be repaired on an emergency or priority

basis". Pemeliharaan ulang yang terjadi akibat peralatan yang rusak dan harus segera diperbaiki karena keadaan darurat atau karena merupakan sebuah prioritas utama.

Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lokasi yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian, alasan penulis memilih Air Terjun Guruh Gemurai sebagai lokasi penelitian adalah karena sampai saat ini objek wisata alam di Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah menghasilkan PAD hanya air terjun Guruh Gemurai. Karena baru Objek Wisata ini yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan dikenakan tarif redistribusi. Namun secara umum, kondisi Aset Pemerintah Daerah yang ada di lokasi objek wisata yang menjadi sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai menjadi salah satu penyebab perlunya penataan manajemen pengolaan dalam melayani pengunjung.

Informan Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain, suatu kejadian, suatu hal kepada peneliti atau kepada pewawancara⁵. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposif, sampel secara sengaja ditetapkan oleh peneliti. Daftar informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Pendidikan Kualitatif dala berbagai disiplin ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

Tabel 1.6
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Dr. H. Indra Suandy ST,M.Si	Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi	1
2	Miswardi,SP,M.Si	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	1
3	Enny Kuswati,S.Pd	Seksi Pengelolaan Destinasi	1
4	Yogi Prinaldi	Sekretaris Desa Kasang	1
5	Radia	Pengujung Air Terjun Guruh Gemurai	1

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu mengenai tanggapan informan tentang data-data maupun informasi yang diperlukan guna penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak

dipermasalahan jumlah informan. (Bungin, 2003:53).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (bungin, 2013). Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah literatur, media cetak, dokumentasi, berbagai buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dan lain-lain untuk melengkapi data primer.

1.1 Tekniuk Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data-data yang lengkap dan diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Dengan pengamatan, penelitian juga dapat menangkap arti fenomena dari segi perhatian subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti bahwa subjek dapat menjadi sumber data bagi peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat secara langsung dan mendalam dari sumbernya. Metode wawancara merupakan salah satu metode

pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena didapatkan langsung dari sumber pertama. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden tertentu.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan

semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

1.2 Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diuraikan secara sistematis dengan berpedoman kepada landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan untuk mencari pemecahan masalah.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dan Ibu Kotanya terletak di Teluk Kuantan. Kota Teluk Kuantan berjarak 160 km dari Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Sejak tanggal 12 oktober tahun 1999 Kabupaten Kuantan Singingi resmi menjadi sebuah Kabupaten di Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan yang dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Selang waktu 11 tahun kemudian, dimekarkan lagi 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Kuantan hilir Seberang, Sentajo Raya dan Pucuk Rantau melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan Kuantan hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Kuantan Singingi resmi memiliki 15 kecamatan, Yakni Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Inuman, Cerenti, Sentajo Raya, Kuantan Hilir Seberang, dan Pucuk Rantau.

Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan tata Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan kedudukan,

tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan visi yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Agamis.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan beberapa Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM dibidang kepariwisataan yang dapat mengalola potensi budaya, kesenian dan lam yang ada menjadi objek dan tujuan wisata Domestik maupun Manca Negara.
2. Menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan.
3. Mempromosikan secara luas tentang kepariwisataan Kabupaten Kuantan Singingi ditingkat local, nasional, dan internasional.
4. Menyusun dan memberlakukan regulasi tentang perusahaan Bidang Kepariwisata dalam rangka Pengawasan dan Ketertiban serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

PEMBAHASAN

Pemeliharaan Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang pemeliharaan aset pemerintah kabupaten Kuantan singing dilokasi objek wisata air terjun guruh gemurai tahun 2019:

Setiap organisasi pasti merancang serta melakukan upaya maupun strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu instansi pemerintah yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi dengan tugas yang disandang sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas pokok dalam mengelola destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti yang tercantum dalam Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Agamis". Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi ingin mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi menjadi daerah tujuan wisata yang mampu bersaing dan unggul dibandingkan daerah-daerah lainnya dalam pengembangan pariwisata yang tidak bertentangan dengan Agama dan Budaya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan dilihat dari tugas nya sebagai pengelola objek wisata yaitu dengan melakukan pemeliharaan terhadap aset Pemerintah Daerah yang berada di lokasi objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai sebagaimana yang terdapat di dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan

Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.90.000.000.

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengembangkan destinasi pariwisata guna mewujudkan destinasi pariwisata unggulan belum optimal. Dimana dari tujuh objek wisata yang diprioritaskan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2016-2021, belum ada objek wisata yang terkategori menjadi destinasi pariwisata unggulan. Dimana belum terpenuhinya unsur-unsur pokok dalam kepariwisataan yaitu atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Dr. H. Indra Suandy, St, M.Si

"Pengembangan destinasi pariwisata di kabupaten Kuantan singing masih belum optimal. Jumlah destinasi pariwisata di kuansing sangat banyak, namun sedikit sekali peminatnya. Salah satu alasan Pacu jalur tidak termasuk lagi ke dalam kalender nasional adalah karena kurangnya wisatawan asing kita. Karena apa? Ya karena tidak terpenuhinya komponen-komponen penting dalam destinasi pariwisata tersebut, seperti atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Begitu juga dengan objek wisata alam" (Rabu, 10 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal. Hal ini dilihat dari komponen-komponen pariwisata yang belum terpenuhi seperti atraksi,

amenitas dan aksesibilitas yang menyebabkan sedikitnya pengunjung yang menyebabkan belum tercapainya PAD dari hasil pemungutan retribusi yang ditargetkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. instrumen hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional.

Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Dalam rangka pengelolaan aset daerah Tahapan pengawasan dan Pemeliharaan aset daerah sangat penting untuk menghindari penyimpangan serta menjaga agar aset daerah tersebut tidak hilang dan tetap terjaga kondisinya secara baik.

(a) Pengawasan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengawasan merupakan kegiatan /tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap. Pengamanan barang milik daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik; pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum.

(b) Pemeliharaan.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19

Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada penelitian Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Pemeliharaan Aset pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Tahun 2019 masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari upaya Dinas Pariwisata sebagai intansi pengelola objek wisata yang belum sepenuhnya melakukan pengelolaan aset daerah dalam tahap pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana penunjang objek wisata yang semestinya dengan terjaganya sarana dan prasarana yang ada akan meningkatkan minat pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut melalui retribusi dari sector pariwisata.

Faktor-Faktor yang menjadi kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset di lokasi objek wisata yaitu, keterbatasan dana, belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Sumber Daya Manusia yang belum memadai. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala adalah rendahnya partisipasi pihak

swasta dalam pengembangan destinasi pariwisata.

2. Saran

Bagi Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan optimal. Kemudian untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melalui penelitian ini dapat dijadikan evaluasi sehingga meningkatkan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola objek wisata guna mewujudkan destinasi pariwisata unggulan yang mana nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sector pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Pendidikan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Baquini, Wardiyanto, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Lubuk Agung: Bandung.
- Husaini Usman & Purnomo Setyadi Akbar, 2014: *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2017 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- M Yusuf. 2015. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- P. Joko Sibagyo, 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dari Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Ridwan, Mohammad. 2012. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Sofmedia Jakarta.
- Siregar, Doli D. 2004, *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siregar, Doli. 2016. *Otonomi dan Pengeolaan Aset Daerah*. Jakarta: Sima(Sinergi Manajemen Aset).
- Zaidan Nawawi, 2015, *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali pres, Palembang. Sosial Dan Ilmu Politit Universitas Hasanuddin Makasar , Makasar.

Artikel

- Jepriyus, 2017, *Upaya Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017 .
- Niu, FAL. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow*. E-Journal Unsrat. Universitas Samratulangi.
- Sugiama A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM

Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah